



# BUKU PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN REMBANG**

**SAMBUTAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN REMBANG**



Assalamu'alaikum wr.wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang dapat menyelesaikan penyusunan "Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang Tahun 2022". Buku Profil Kependudukan ini berisi 7 bab antara lain, Pendahuluan, Gambaran Umum Kabupaten Rembang, Kuantitas Penduduk, Kualitas Penduduk, Mobilitas Penduduk, Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Penutup.

Buku profil ini dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi permasalahan kependudukan yang diperlukan oleh para perumus kebijakan, perencana, pengambil keputusan terutama dalam mengintegrasikan aspirasi dan kepentingan dalam proses pembangunan segala bidang. Sebagian data yang dipergunakan dalam buku ini berasal dari segala OPD yang berkaitan dengan masalah kependudukan di Kabupaten Rembang.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyediakan, mengolah, dan menganalisis data profil perkembangan kependudukan ini. Masukan dan saran untuk perbaikan sangat kami harapkan, dan akhirnya kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Rembang, Desember 2023  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN  
REMBANG,

**Drs. SUPARMIN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196505071993031013

## KATA PENGANTAR

Buku profil perkembangan kependudukan Kabupaten Rembang tahun 2022 disusun dengan mengacu pada amanat yang disampaikan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan yang diterbitkan setiap tahun. Buku profil memberikan informasi mengenai data kependudukan sebagai penunjang dalam penyusunan kebijakan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan Pasal 83 ayat (1) yaitu “Data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan”.

Profil Perkembangan Kependudukan ini disusun berdasarkan Data Konsolidasi dan Pembersihan dari Kementerian Dalam Negeri Semester 2 (dua) tahun 2022 dan Data Pelayanan Pencatatan Sipil dari Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2022 serta data kependudukan dari lintas sektor terkait di Kabupaten Rembang. Informasi dalam buku ini diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi perkembangan kependudukan di Kabupaten Rembang dalam berbagai aspek sehingga mendukung terlaksananya pembangunan berwawasan kependudukan yang berkesinambungan di Kabupaten Rembang.

Masukan, saran dan kerjasama terpadu dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk lebih sempurnanya Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang di tahun-tahun berikutnya.

# DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penyusunan .....	1
1.2 Tujuan .....	2
1.3 Ruang Lingkup .....	2
1.4 Sumber Data .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH</b> .....	<b>4</b>
2.1 Letak Geografis .....	4
2.2 Kondisi Demografis .....	6
2.3 Gambaran Ekonomi .....	7
2.4 Potensi Daerah .....	7
2.5 Visi dan Misi .....	9
2.5 Sasaran .....	10
<b>BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN</b> .....	<b>11</b>
A. Kuantitas Penduduk .....	11
1. Jumlah Penduduk dan Persebaran Penduduk .....	11
a. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin .....	11
b. Kepadatan Penduduk .....	12
c. Laju Pertumbuhan Penduduk .....	13
B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi .....	14
1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	14
2. Rasio Jenis Kelamin ( <i>Sex Ratio</i> ) .....	17
3. Rasio Ketergantungan Penduduk ( <i>Dependency Ratio</i> ) .....	19
C. Komposisi Penduduk Menurut Karakteristik Sosial .....	20
1. Komposisi Penduduk Menurut Status Perkawinan .....	21
2. Rata – Rata Umur Kawin Pertama ( <i>Singulate Mean Age at Marriage</i> ).....	22

D. Kelahiran (Fertilitas) .....	24
1. Angka Kelahiran Kasar .....	25
2. Angka Kematian .....	26
a. Jumlah Pencatatan Kematian .....	26
b. Angka Kematian Kasar .....	28
<b>BAB IV KUALITAS PENDUDUK .....</b>	<b>29</b>
A. Kesehatan .....	30
B. Pendidikan .....	31
1. Angka Melek Huruf .....	32
2. Angka Putus Sekolah .....	33
C. Ekonomi .....	34
1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja .....	35
D. Sosial .....	37
1. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas .....	37
<b>BAB V MOBILITAS PENDUDUK .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB VI KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN .....</b>	<b>44</b>
A. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) .....	45
B. Kepemilikan Akta .....	47
1. Akta Kelahiran .....	47
2. Akta Perkawinan .....	49
3. Akta Perceraian .....	50
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Rembang .....	6
Gambar 3.1 Piramida Penduduk Kabupaten Rembang .....	17

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk di Kabupaten Rembang Tahun 2022 .....	11
Tabel 3.2 Rasio Kepadatan Penduduk Persentase per Kecamatan .....	12
Tabel 3.3 Angka Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan .....	13
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin .....	15
Tabel 3.5 Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Rembang .....	18
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Rembang .....	20
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan .....	21
Tabel 3.8 Angka Perkawinan Sesuai Kelompok Umur .....	22
Tabel 3.9 Persentase Lajang .....	23
Tabel 3.10 Angka Kelahiran Kasar Per Kecamatan .....	25
Tabel 3.11 Angka Pencatatan Kematian Berdasarkan Jenis Kelamin .....	27
Tabel 3.12 Angka Pencatatan Kematian Kasar Berdasarkan Jenis Kelamin .....	29
Tabel 4.1 Angka Melek Huruf Kabupaten Rembang .....	33
Tabel 4.2 Angka Putus Sekolah .....	34
Tabel 4.3 Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja per Kecamatan .....	36
Tabel 4.4 Angka Penyandang Cacat Tahun 2022 .....	38
Tabel 5.1 Angka Migrasi Masuk per Kecamatan .....	40
Tabel 5.2 Angka Migrasi Keluar per Kecamatan .....	41
Tabel 5.3 Angka Migrasi Neto per Kecamatan .....	42
Tabel 6.1 Persentase Kepemilikan KTP Kabupaten Rembang .....	46
Tabel 6.2 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran .....	48
Tabel 6.3 Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan .....	49
Tabel 6.4 Persentase Kepemilikan Akta Perceraian .....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan**

Pemerintah melaksanakan berbagai program pembangunan sebagai upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Data Kependudukan dan potensi yang dimiliki daerah merupakan aspek penting dalam perencanaan program pembangunan suatu wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Rembang. Dengan visi-misi yang telah ditetapkan dan slogan Rembang “GEMILANG BERKELANJUTAN” maka dibutuhkan data dan informasi kependudukan yang valid, lengkap, akurat, meliputi jumlah, struktur pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama serta lingkungan penduduk. Adanya perencanaan yang baik diharapkan pembangunan di Kabupaten Rembang bisa berjalan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan untuk kesejahteraan penduduk.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa dalam Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah, baik yang menyangkut masalah kependudukan, potensi sumber daya daerah maupun informasi lainnya. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga mengamanatkan agar pembangunan di bidang kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, guna penyediaan data dan informasi kependudukan sebagai acuan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ditegaskan pula dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 bahwa data kependudukan yang dapat disajikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan apapun adalah data kependudukan yang sudah dikonsolidasikan dan dibersihkan

oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Sejalan dengan hal tersebut dan sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan, maka penyusunan buku profil perkembangan kependudukan tahun 2022 Kabupaten Rembang ini bersumber dari database SIAK Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri RI Semester II Tahun 2022 serta dari lintas sektoral terkait.

## **A. TUJUAN**

Penyajian dan pengolahan data registrasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta data dari lintas sektor terkait lainnya dalam bentuk Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022 ini adalah untuk :

1. Memberi gambaran umum tentang kondisi geografis dan demografis, potensi, perkembangan dan prospek kependudukan di wilayah Kabupaten Rembang;
2. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pembangunan di Kabupaten Rembang;
3. Menyediakan data dan informasi bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai Instansi pelaksana Administrasi Kependudukan dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan tahun 2022 berskala Provinsi.

## **B. RUANG LINGKUP**

Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang, mencakup gambaran umum wilayah Kabupaten Rembang, data kuantitatif yang berkaitan dengan kuantitas Penduduk, pengembangan kualitas penduduk, mobilitas penduduk serta kepemilikan dokumen kependudukan serta gambaran

permasalahan terkait kependudukan sebagai rekomendasi dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan.

### **C. SUMBER DATA**

1. Sumber data utama dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang Tahun 2022 adalah data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) operasional status hingga 31 Desember 2022 yang telah dikonsolidasikan oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI;
2. Data Pendukung adalah data terkait kependudukan dari lintas sektoral.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAERAH**

#### **2.1 Letak Geografis**

Kabupaten Rembang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa di utara, di timur berbatasan dengan Kabupaten Tuban (Jawa Timur), Kabupaten Blora di sebelah selatan, serta di barat berbatasan dengan Kabupaten Pati. Menurut letak geografisnya, Kabupaten Rembang terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, pada koordinat 111°00'-111°30' Bujur Timur dan 6°30' - 7°6' Lintang Selatan, sehingga bisa dikatakan sebagai gerbang timur Provinsi Jawa Tengah, yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur yaitu Kecamatan Sarang, sedangkan di bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah Perbukitan, yang merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Adapun pada sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem pada ketinggian 806 meter, yang kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.

Kabupaten Rembang memiliki luas 101.408 hektar yang terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar atau sebesar (28,65%), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38%), dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96%). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen.

Kabupaten Rembang beriklim tropis basah dan kering dengan dua pola musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan di wilayah Rembang berlangsung pada periode November hingga April sebagai akibat dari hembusan angin monsun baratan yang bersifat basah, lembap, serta banyak membawa uap air. Sementara itu, musim kemarau di Rembang terjadi pada periode Mei hingga Oktober sebagai akibat dari tiupan angin monsun timuran yang bersifat kering dan sangat

sedikit membawa uap air. Suhu udara di wilayah Rembang berkisar antara 23°–34 °C dengan tingkat kelembapan relatif antara 60% hingga 90%.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah (46,39%), yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100 – 500 mdpl (30,42%) dan sisanya pada ketinggian 0 – 25 dan 500 – 1000 mdpl. Wilayah Kabupaten Rembang seluas 45.205 ha (46,58%) mempunyai kelerengan sebesar 0-2%, sedangkan 33.233 ha lainnya (34,18%) mempunyai kelerengan sebesar 2-15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 15-40% dan > 40% masing – masing seluas 14,38% dan 4,86% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

Jenis tanah di Kabupaten Rembang diantaranya adalah Mediterial, Grumosol, Aluvial, Andosol dan Regosol. Jenis tanah Mediterial merupakan jenis tanah yang mendominasi di Kabupaten Rembang, yaitu meliputi 45%, sedangkan jenis Grumosol hanya 32%, Alluvial 32%, Andusol 8% dan Regosol 5%.

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa sungai dan dam. Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Rembang antara lain Sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyan. Di Kabupaten Rembang terdapat 121 dam dan 25 daerah irigasi, dari jumlah tersebut, tidak semuanya dialiri air sepanjang tahun.

**Gambar 2.1**  
**Peta Kabupaten Rembang**



## 2.2 Kondisi Demografis

Kabupaten Rembang yang terbagi menjadi 14 kecamatan, 287 desa dan 7 kelurahan, terdiri dari jumlah Rukun Warga sebanyak 971 dan jumlah Rukun tetangga sebanyak 3.478. Sedangkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 jumlah penduduk Kabupaten Rembang sebanyak 651.704 jiwa yang terdiri pria 328.017 jiwa dan wanita 323.687 jiwa.

Agama yang terdapat di Kabupaten Rembang terdiri dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu/Penghayat Kepercayaan. Mayoritas penduduk Kabupaten Rembang memeluk agama Islam, dan sebagian lainnya memeluk agama lain dan sebagian kecil lain menganut kepercayaan.

Sedangkan dalam sehari - hari penduduk di Kabupaten Rembang menggunakan bahasa jawa dengan sebagian lainnya berbahasa Indonesia.

## 2.3 Gambaran Ekonomi

Jumlah pasar tradisional yang ada di Kabupaten Rembang saat ini lebih dari 30 buah yang tersebar di seluruh kecamatan secara merata dan berkembang dengan pesat. Sedangkan jumlah minimarket yang ada saat ini berjumlah lebih dari 15 buah dan diperkirakan akan terus bertambah seiring dengan semakin ramainya perekonomian di Kabupaten Rembang. Disamping itu toko, warung, dan juga kios juga semakin banyak dan diperkirakan mencapai lebih dari 4000 unit yang tersebar baik di tiap desa bahkan dusun yang ada.

- a. Hal ini memudahkan bagi UMKM untuk memasarkan hasil produksi kepada masyarakat / konsumen yang membutuhkan,.
- b. Jalan adalah prasarana pengangkutan yang paling utama dalam menggerakkan roda perekonomian, semakin besar kegiatan perekonomian yang berjalan semakin dibutuhkan akses jalan guna memudahkan mobilitasi penduduk dan memperlancar lalu lintas barang.

Panjang jalan di Kabupaten Rembang yang mencapai 761,467 km yang merupakan jalan negara, provinsi dan jalan kabupaten, memiliki kurang lebih 9 terminal yang tersebar di beberapa kecamatan.

## 2.4 Potensi Daerah

- A. Kabupaten Rembang memiliki potensi perikanan dan kelautan yang sangat besar dengan wilayah pantai sepanjang  $\pm$  62,5 km. Di dalamnya terkandung berbagai potensi hasil laut dan yang cukup melimpah, dengan jenis yang dominan adalah ikan layang, kembung, selar, manyung, layur, kakap, tongkol, cumi-cumi, kurisi, teri, tunul, mermang dan rajungan. Selain itu, ditunjang dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk yang tinggal di sepanjang pantai adalah nelayan dan pengolahan hasil laut
- B. Potensi pertanian Kabupaten Rembang yaitu meliputi produk tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan dengan produk unggulan meliputi palawija yaitu kedelai,

kacang tanah, kacang hijau dan ubi kayu. Sedangkan tanaman hortikultura yaitu kacang panjang, bawang merah dan cabe. Adapun buah – buahan produk unggulannya adalah mangga, melon, durian ceriwick, duku woro serta tidak ketinggalan tanaman kawis dan siwalan yang sangat jarang ditemui diluar Kabupaten Rembang.

- C. Selain produk pertanian dan perkebunan, potensi lain yang telah dikembangkan dan menjadi salah satu penyumbang PAD kabupaten rembang adalah batik lasem. Batik lasem merupakan akulturasi budaya jawa dan tiongkok yang dapat dilihat dari coraknya yang memiliki khas unik serta warna-warni yang menarik dan berani, jumlah pengrajin batik lasem saat ini mencapai kurang lebih 80 pengrajin yang tersebar diseluruh Kabupaten Rembang.

Adapula makanan khas yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri dan menjadi produk unggulan juga, seperti lontong tuyuhan, dumbeg, kaoya dudul, legen, kelo mrico, mangut, sate srepeh, urap latoh. Makanan dan minuman tersebut merupakan makanan khas dari Kabupaten Rembang yang setiap tahunnya banyak diburu wisatawan atau mungkin penduduk asli yang sudah bermukim di kota lain.

Objek pariwisata yang juga bisa menjadi potensi daerah Kabupaten Rembang sekarang, ada sebanyak lebih dari 20 objek. Jumlah ini bertambah dengan dibukanya objek wisata Pantai Wates (Pasir Putih), Nyamplung, Karang Jahe, dan Pantai Balongan. Selain itu masih ada lagi objek wisata lain seperti Museum RA Kartini, Makam RA Kartini, Petilasan Sunan Bonang Klentheng Tjoe Hwei Kiong, Klentheng Dasun Vihara Ratanavana Arama, Wisata Sejarah Kota Lasem, Taman Rekreasi Pantai Kartini, Pantai Soka Pulau Gede, Pulau Marongan, Pantai Caruban, Pantai Jatisari, Pantai Binangun, Taman Wisata Mantingan, Bumi Perkemahan Karang Sari Park, Puncak Argopuro Lasem, Wana Wisata Sumber Semen, Hutan Mangrove Rembang, Ngulahan park, Puri Berlian Park, Taman Sarinah, Bukit Cendana, Embung Lodan, Embung Panohan.

Untuk mendukung kepariwisataan, telah ada pula fasilitas tempat makan yang tersebar di sekitar objek wisata sebanyak lebih dari 30 rumah makan yang menyerap tenaga kerja lebih dari 230 orang. Selain itu pula telah ada sekitar 17 hotel di Kabupaten Rembang, yang bisa menyediakan akomodasi baik kelas melati ataupun berbintang.

## **2.5 Visi dan Misi**

### **A. Visi dan Misi Kabupaten Rembang**

Visi Kabupaten Rembang : “Mewujudkan Rembang Gemilang 2026 ”.

Misi Kabupaten Rembang :

1. Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi, organisasi dan tata kerja birokrasi;
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial;
3. Membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
4. Mengembangkan kemandirian desa berbasis potensi lokal.

### **B. Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang telah menetapkan visi misi, antara lain :

#### **a. VISI**

1. Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Capil yang dapat menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Rembang;
2. Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat dalam Pengurusan Akta Pencatatan Sipil dan Kependudukan Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah.

#### **b. MISI**

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur;
2. Meningkatkan pelayanan Akta Catatan Sipil;
3. Meningkatkan pelayanan Administrasi Kependudukan;

4. Mewujudkan semua anak berakta kelahiran.

**C. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang**

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik;
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Layanan Kependudukan .

## BAB III PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

### A. Kuantitas Penduduk

Kuantitas Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil demografis, seperti Fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi/perpindahan penduduk. Dalam Bab III ini akan di bahas mengenai komposisi penduduk based jumlah dan persebaran penduduk menurut karakteristik demografi.

#### 1. Jumlah Penduduk dan Persebaran Penduduk

Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak, persebaran dapat dilihat dari jumlah dan proporsi penduduk menurut jenis kelamin, kepadatan penduduk dan capai pertumbuhan penduduk.

##### a. Jumlah Penduduk Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin

Kabupaten rembang terbagi menjadi 14 kecamatan yang memiliki 287 desa dan 7 kelurahan dengan jumlah penduduk sebesar 651.704 yang terdiri 328.017 jiwa laki-laki (50,33%) dan 323.687 jiwa perempuan (49,67%).

**Tabel 3.1**  
**Distribusi Penduduk di Kabupaten Rembang Desember**  
**Tahun 2022**

No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	SUMBER	18.618	5,68%	18.749	5,79%	37.367	5,73%
2	BULU	14.261	4,35%	14.140	4,37%	28.401	4,36%
3	GUNEM	12.398	3,78%	12.155	3,76%	24.553	3,77%
4	SALE	19.705	6,01%	19.348	5,98%	39.053	5,99%
5	SARANG	31.590	9,63%	30.335	9,37%	61.925	9,50%
6	SEDAN	28.727	8,76%	27.550	8,51%	56.277	8,64%

7	PAMOTAN	25.728	7,84%	24.881	7,69%	50.609	7,77%
8	SULANG	19.780	6,03%	19.828	6,13%	39.608	6,08%
9	KALIORI	21.458	6,54%	21.806	6,74%	43.264	6,64%
10	REMBANG	45.750	13,95%	46.316	14,31%	92.066	14,13%
11	PANCUR	15.860	4,84%	15.536	4,80%	31.396	4,82%
12	KRAGAN	33.213	10,13%	32.600	10,07%	65.813	10,10%
13	SLUKE	15.012	4,58%	14.851	4,59%	29.863	4,58%
14	LASEM	25.917	7,90%	25.592	7,91%	51.509	7,90%
<b>TOTAL</b>		<b>328.017</b>	100,00%	<b>323.687</b>	100,00%	<b>651.704</b>	100,00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Kecamatan Rembang merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 92.066 jiwa (14,13%) dari total penduduk Kabupaten Rembang, sedangkan distribusi penduduk Kecamatan Gunem dengan jumlah penduduk terkecil yaitu 24.553 jiwa (3,77%) dari jumlah penduduk Kabupaten Rembang.

#### b. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk terhadap suatu luas dengan mengetahui kepadatan penduduk dapat diketahui konsentrasi penduduk pada suatu wilayah untuk digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan pemerataan persebaran penduduk misalnya melalui imigran dan transmigrasi

**Tabel 3.2**  
**Rasio Kepadatan Penduduk Persentase Jumlah Total Per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk		Luas Wilayah (KM <sup>2</sup> )	Kepadatan Penduduk
	Kode	Nama	N	%		
1	33.17.01	SUMBER	37.367	0,06	78,20	477,84
2	33.17.02	BULU	28.401	0,04	101,10	280,92
3	33.17.03	GUNEM	24.553	0,04	84,74	289,75
4	33.17.04	SALE	39.053	0,06	109,02	358,22
5	33.17.05	SARANG	61.925	0,10	93,83	659,97
6	33.17.06	SEDAN	56.277	0,09	86,35	651,73
7	33.17.07	PAMOTAN	50.609	0,08	80,60	627,90

8	33.17.08	SULANG	39.608	0,06	84,81	467,02
9	33.17.09	KALIORI	43.264	0,07	61,17	707,27
10	33.17.10	REMBANG	92.066	0,14	61,55	1.495,79
11	33.17.11	PANCUR	31.396	0,05	43,01	729,97
12	33.17.12	KRAGAN	65.813	0,10	67,18	979,65
13	33.17.13	SLUKE	29.863	0,05	38,02	785,46
14	33.17.14	LASEM	51.509	0,08	46,12	1.116,85
<b>Total</b>			<b>651.704</b>		<b>1.035,70</b>	<b>629,24</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Luas wilayah Kabupaten Rembang tercetak sebesar 1035,70 km<sup>2</sup> dengan wilayah pemukiman cukup padat berada di Kabupaten Rembang Lasem. Berdasarkan persebaran wilayah pada tabel 3.2 diketahui bahwa Kecamatan Rembang merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 1.495,79 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan tingkat kepadatan terendah yaitu Kecamatan Bulu dengan kepadatan sebesar 280,92 jiwa/km<sup>2</sup>.

### c. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Laju pertumbuhan penduduk adalah rata-rata tahunan laju perubahan jumlah penduduk suatu daerah selama periode tertentu sehingga dapat diketahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

**Tabel 3.3**  
**Angka Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Tahun 2021	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Angka pertumbuhan penduduk
	Kode	Nama			
1	33.17.01	SUMBER	36.988	37.367	1,02
2	33.17.02	BULU	28.146	28.401	0,91
3	33.17.03	GUNEM	24.448	24.553	0,43
4	33.17.04	SALE	38.798	39.053	0,66
5	33.17.05	SARANG	61.230	61.925	1,14
6	33.17.06	SEDAN	55.618	56.277	1,18
7	33.17.07	PAMOTAN	50.266	50.609	0,68
8	33.17.08	SULANG	39.332	39.608	0,70
9	33.17.09	KALIORI	42.848	43.264	0,97

10	33.17.10	REMBANG	91.618	92.066	0,49
11	33.17.11	PANCUR	31.093	31.396	0,97
12	33.17.12	KRAGAN	65.211	65.813	0,92
13	33.17.13	SLUKE	29.770	29.863	0,31
14	33.17.14	LASEM	51.111	51.509	0,78
Total			646.477	651.704	0,81

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa laju pertumbuhan Kabupaten Rembang tahun 2021 sebesar 0,81 persen. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang pada tahun 2022 termasuk dalam kategori tinggi yakni berkisar antara 0-1%. Jika dilihat menurut kecamatan, Kecamatan Sedan merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi yakni 1,18 persen, diikuti Kecamatan Sarang yakni 1,14 persen, dan Kecamatan Sluke merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk terendah yakni 0,31 persen.

## B. Penduduk Menurut Karakteristik Demografi

Indikator penduduk menurut karakter demografi dapat dilihat dari usia dan jenis kelamin, status perkawinan, keluarga, pendidikan, agama, kecacatan, kelahiran dan kematian. Data awal yang dipakai adalah merupakan data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang Tahun 2022. Karenanya tidak menutup kemungkinan terdapat penurunan jumlah penduduk dibandingkan tahun 2021.

### 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin berguna dalam membantu menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya. Setiap kelompok umur memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, misalnya kelompok bayi dan balita, mereka lebih

mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan status kesehatan agar ketika memasuki usia perkawinan tidak terkena anemia, sedangkan kelompok penduduk usia lanjut juga membutuhkan pelayanan berkaitan dengan kesehatan dan sebagainya.

Tabel 3.4 menggambarkan komposisi penduduk usia kerja (produktif) terbesar yang berada pada penduduk berumur 40-44 tahun yakni 52.510 jiwa (8,06%). Demikian pula dengan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, nampak bahwa penduduk laki-laki usia kerja yang terbesar berada pada kelompok umur 40-44 tahun, gambaran yang sama untuk penduduk perempuan.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	<b>0-4</b>	18.402	5,61%	17.260	5,33%	35.662	5,47%
2	<b>5-9</b>	24.875	7,58%	23.340	7,21%	48.215	7,40%
3	<b>10-14</b>	25.484	7,77%	23.725	7,33%	49.209	7,55%
4	<b>15-19</b>	23.204	7,07%	21.698	6,70%	44.902	6,89%
5	<b>20-24</b>	25.604	7,81%	24.767	7,65%	50.371	7,73%
6	<b>25-29</b>	24.369	7,43%	23.246	7,18%	47.615	7,31%
7	<b>30-34</b>	24.196	7,38%	23.859	7,37%	48.055	7,37%
8	<b>35-39</b>	24.634	7,51%	24.755	7,65%	49.389	7,58%
9	<b>40-44</b>	26.404	8,05%	26.106	8,07%	52.510	8,06%
10	<b>45-49</b>	24.054	7,33%	24.003	7,42%	48.057	7,37%
11	<b>50-54</b>	21.921	6,68%	22.294	6,89%	44.215	6,78%
12	<b>55-59</b>	20.114	6,13%	21.021	6,49%	41.135	6,31%
13	<b>60-64</b>	17.174	5,24%	17.820	5,51%	34.994	5,37%
14	<b>65-69</b>	12.411	3,78%	12.635	3,90%	25.046	3,84%
15	<b>70-74</b>	8.399	2,56%	7.664	2,37%	16.063	2,46%
16	<b>&gt;=75</b>	6.772	2,06%	9.494	2,93%	16.266	2,50%
<b>Jumlah</b>		<b>328.017</b>		<b>323.687</b>		<b>651.704</b>	

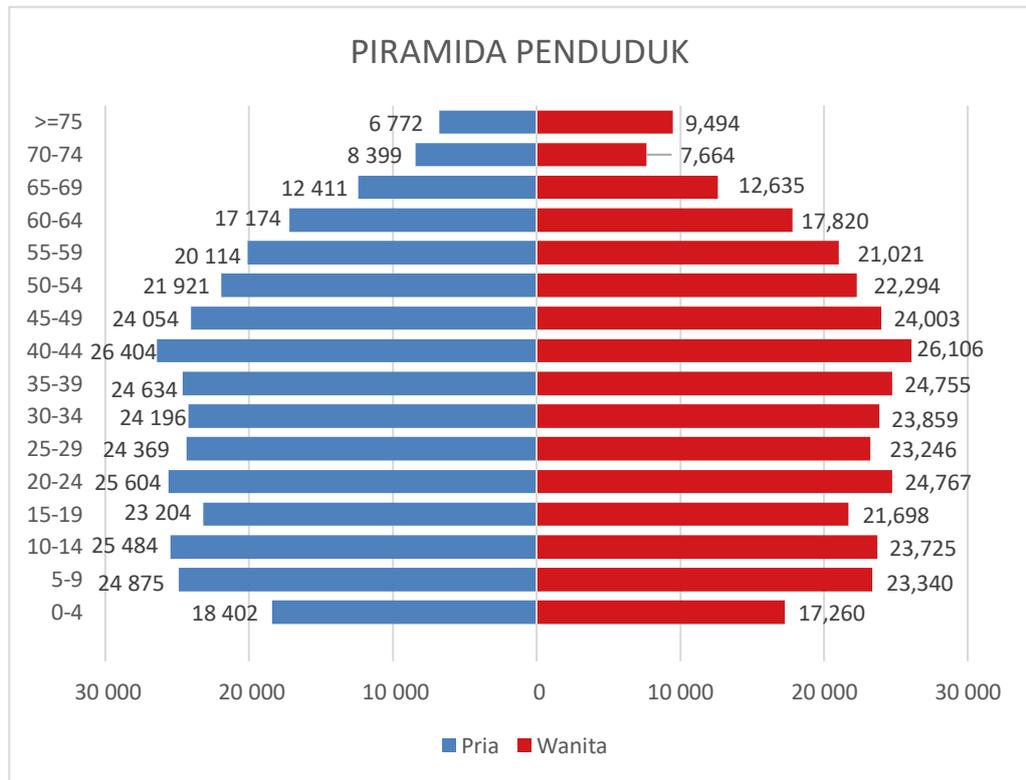
*Sumber* : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin tersebut dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dengan melihat gambar piramida penduduk, secara sekilas kita mengetahui struktur umur penduduk dan implikasinya terhadap tuntutan pelayanan kebutuhan dasar penduduk (baik balita, remaja, dewasa, laki-laki, perempuan, dan lansia) sekaligus melihat potensi tenaga kerja serta membayangkan kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan.

Pada gambar 3.1 Piramida penduduk Kabupaten Rembang menunjukkan struktur penduduk konstruktif dengan struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya. Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun yang terletak pada dasar piramida mulai mengecil walaupun masih terlihat lebar. Ini menunjukkan angka kelahiran mulai menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya, walaupun dari segi jumlah absolut tidak kecil. Demikian juga dengan jumlah penduduk 5-9 tahun masih terlihat lebar, berarti lima tahun ke depan dibutuhkan fasilitas pendidikan dasar dan menengah yang cukup untuk menampung penduduk kelompok ini.

Demikian pula jumlah penduduk pada kelompok umur 40-44 tahun menunjukkan jumlah yang paling besar. Diduga kelompok umur 40-44 tahun ini adalah penduduk Kabupaten Rembang ditambah dengan migran yang masuk ke Kabupaten Rembang untuk bekerja atau sekolah. Penduduk lansia 70-74 (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang kecil. Namun dimasa depan proporsi penduduk lansia akan terus merambat naik, karena pergeseran umur penduduk serta usia harapan hidup yang semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi dari sekarang, karena kelompok ini akan terus membesar di masa depan, sehingga diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

**Gambar 3.1**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

## 2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Rasio Jenis kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Data rasio jenis kelamin ini berguna untuk perkembangan perencanaan pembangunan berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Misalnya, dalam bidang pendidikan harus berwawasan gender dengan memperhitungkan kedua jenis kelamin dengan mengetahui berapa banyaknya laki-laki dan perempuan dalam umur yang sama.

Selain itu, informasi jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen.

**Tabel 3.5**  
**Rasio Jenis Kelamin Tahun 2022**

No	Kelompok Umur	Pria	Wanita	Jumlah Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	<b>0-4</b>	18.402	1.726	35.662	106,62
2	<b>5-9</b>	24.875	23.34	48.215	106,58
3	<b>10-14</b>	25.484	23.725	49.209	107,41
4	<b>15-19</b>	23.204	21.698	44.902	106,94
5	<b>20-24</b>	25.604	24.767	50.371	103,38
6	<b>25-29</b>	24.369	23.246	47.615	104,83
7	<b>30-34</b>	24.196	23.859	48.055	101,41
8	<b>35-39</b>	24.634	24.755	49.389	99,51
9	<b>40-44</b>	26.404	26.106	52.51	101,14
10	<b>45-49</b>	24.054	24.003	48.057	100,21
11	<b>50-54</b>	21.921	22.294	44.215	98,33
12	<b>55-59</b>	20.114	21.021	41.135	95,69
13	<b>60-64</b>	17.174	17.82	34.994	96,37
14	<b>65-69</b>	12.411	12.635	25.046	98,23
15	<b>70-74</b>	8.399	7.664	16.063	109,59
16	<b>&gt;=75</b>	6.772	9.494	16.266	71,33
JUMLAH		328.017	323.687	651.704	101,34

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Dari tabel 3.5 nampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) atau *Sex Ratio* di Kabupaten Rembang tahun 2022 adalah 101,34 yang berarti bahwa terdapat 101 orang laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Namun demikian, jika dilihat dari kelompok umur, proporsi penduduk laki-laki lebih besar pada kelompok umur 40-44 tahun, 20-24 tahun, 10-14 tahun, 5-9 tahun dan kelompok umur tua yakni diatas 70 tahun ke atas. Sedangkan jika dilihat pada kelompok umur 0-4 tahun adalah 106,62 yang artinya terdapat 106-107 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis jumlah kelahiran bayi laki-laki pada umumnya lebih besar dibanding dengan kelahiran bayi perempuan. Namun bayi laki-laki lebih rentan terhadap kematian dibanding bayi perempuan.

### 3. Rasio Ketergantungan Penduduk (*Dependency Ratio*)

Rasio Ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*Dependency Ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif. Penduduk produktif secara ekonomi adalah mereka yang berada pada umur 15-64 tahun, yang dianggap memiliki potensi ekonomi atau penduduk yang berpotensi sebagai modal pembangunan. Sedangkan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap kurang produktif atau tidak produktif lagi (65 tahun atau lebih). Semakin tingginya persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi dan semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif atau belum produktif.

Dari tabel 3.6 nampak bahwa 70,77% penduduk Kabupaten Rembang merupakan penduduk usia produktif (usia kerja) yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan sekaligus penggerak roda ekonomi bangsa. Sedangkan penduduk yang berpotensi sebagai beban yaitu penduduk belum produktif (0-14 tahun) sebesar 28,86% dan penduduk tidak produktif (65 tahun atau lebih) sebesar 12,44%.

Jika dilihat dari jenis kelamin maka jumlah penduduk produktif laki-laki lebih besar daripada perempuan. Rasio ketergantungan total Kabupaten Rembang tahun 2022 sebesar 41,29% angka ini menunjukkan dari setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Rembang mempunyai tanggungan sebanyak 41 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

**Tabel 3.6**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin**

No	Kelompok Umur	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	0-14	68.761	20,96%	64.325	19,87%	133.086	28,86%
2	15-64	231.674	70,63%	229.569	70,92%	461.243	70,77%
3	>64	27.582	8,41%	29.793	9,20%	57.375	12,44%
		328.017		323.687		651.704	

*Sumber* : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Rasio ketergantungan total Kabupaten Rembang jika dirinci jenis kelamin, dari tabel 3.6 terlihat bahwa rasio ketergantungan perempuan lebih rendah dibandingkan rasio ketergantungan laki-laki.

### **C. Komposisi Penduduk menurut Karakteristik Sosial**

Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk atas variabel-variabel tertentu. Komposisi penduduk menggambarkan susunan penduduk yang dibuat berdasarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik-karakteristik yang sama (Said Rusli dalam Bagoes, Mantra, 2000: 23).

Pengelompokan penduduk atau komposisi penduduk dapat digunakan untuk dasar dalam pengambilan kebijakan dan pembuatan program dalam mengatasi masalah-masalah di bidang kependudukan.

Komposisi penduduk menurut karakteristik sosial merupakan pengelompokan penduduk menurut kriteria sosial seperti pendidikan, pekerjaan, agama, perkawinan, dan lain sebagainya. Dalam Bab Kuantitas ini yang akan dibahas adalah berkaitan dengan perkawinan.

## 1. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Informasi tentang struktur perkawinan penduduk pada waktu tertentu berguna bagi para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan. Terutama dalam hal pembangunan keluarga, kelahiran dan upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Dari informasi penduduk berstatus kawin, umur perkawinan pertama, lama kawin akan berguna untuk mengestimasi angka kelahiran yang akan terjadi. Umur perkawinan pertama misalnya berkaitan dengan lamanya seseorang perempuan beresiko untuk hamil dan melahirkan. Perkawinan umur dini juga akan berakibat pada besarnya angka perceraian, ketidaksiapan orang tua untuk pengasuhan anak serta kurang matangnya perempuan menjalankan tugas dan fungsinya dalam rumah tangga.

**Tabel 3.7**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan**

No	Status Perkawinan	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	Cerai Mati	6.403	1,95%	30.791	9,51%	37.194	5,71%
2	Cerai Hidup	4.632	1,41%	7.166	2,21%	11.798	1,81%
3	Kawin	173.466	52,88%	175.837	54,32%	349.303	53,60%
4	Belum Kawin	143.516	43,75%	109.893	33,95%	253.409	38,88%
		328.017		323.687		651.704	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Pada tabel 3.7 proporsi penduduk berstatus cerai hidup maupun cerai mati lebih besar pada perempuan daripada laki-laki. Hal ini disebabkan laki-laki yang bercerai, baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan, apabila perempuan tersebut sudah mandiri secara ekonomi. Dari tabel di atas dapat diasumsikan bahwa penduduk Kabupaten Rembang baik laki-laki maupun perempuan melangsungkan pernikahan di usia yang cukup matang.

**Tabel 3.8**  
**Angka Perkawinan Sesuai Kelompok Umur**

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Berstatus Kawin	Angka Perkawinan
		Pria	Wanita	Jumlah		
1	15-19	23.204	21.698	44.902	202	4,50
2	20-24	25.604	24.767	50.371	9.043	179,53
3	25-29	24.369	23.246	47.615	27.815	584,16
4	30-34	24.196	23.859	48.055	39.276	817,31
5	35-39	24.634	24.755	49.389	44.084	892,59
6	40-44	26.404	26.106	52.510	47.719	908,76
7	45-49	24.054	24.003	48.057	43.617	907,61
8	50-54	21.921	22.294	44.215	39.046	883,09
9	55-59	20.114	21.021	41.135	34.901	848,45
10	60-64	17.174	17.820	34.994	27.863	796,22
11	65-69	12.411	12.635	25.046	18.047	720,55
12	70-74	8.399	7.664	16.063	10.356	644,71
13	>=75	6.772	9.494	16.266	7.333	450,82
Jumlah		259.256	259.362	518.618	349.302	673,52

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah*

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa penduduk 40-44 Tahun Kabupaten Rembang didominasi oleh penduduk berstatus kawin yakni 47.719 jiwa, begitu pula untuk penduduk laki-laki maupun perempuan. Jumlah penduduk laki-laki yang berstatus kawin sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan. Sementara penduduk laki-laki berstatus belum kawin lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan (143.516 jiwa dengan 109.893 jiwa) lihat tabel 3.7.

## **2. Rata-Rata Umur Kawin Pertama (*Singulate Mean Age at Marriage/SMAM*)**

*Singulate Mean Age at Marriage* adalah perkiraan (estimasi) untuk rata-rata umur kawin pertama berdasarkan jumlah penduduk yang tetap lajang (belum kawin). Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fertilitas. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat fertilitas seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil

potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia suburnya dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat fertilitas perempuan tersebut.

**Tabel 3.9**  
**Persentase Lajang**

No	Kelompok Umur	Total		
		Belum Kawin	Jumlah Penduduk	% Lajang
1	15-19	44.694	44.902	99,54%
2	20-24	41.132	50.371	81,66%
3	25-29	19.035	47.615	39,98%
4	30-34	7.347	48.055	15,29%
5	35-39	3.366	49.389	6,82%
6	40-44	1.932	52.510	3,68%
7	45-49	1.043	48.057	2,17%
8	50-54	710	44.215	1,61%
Jumlah		119.259	385.114	30,97%

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah*

Angka perkawinan pertama ini dalam data persentase lajang menunjukkan bahwa rata-rata penduduk perempuan di Kabupaten Rembang telah menunda perkawinan karena diduga mereka lebih memilih melanjutkan pendidikan dan masuk ke pasar kerja. Angka ini juga mencerminkan bahwa penduduk perempuan di Kabupaten Rembang saat memutuskan untuk membina rumah tangga telah matang secara mental dan reproduksi.

Tingginya angka rata-rata umur kawin pertama penduduk perempuan yang dihasilkan dari data pelayanan SIAK terolah, dikarenakan data penduduk yang berstatus kawin yang ada dalam database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah penduduk yang mempunyai bukti perkawinan yang sah menurut Negara. Ada kemungkinan pula penduduk muslim yang berstatus kawin sah secara agama maupun Negara, namun belum melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Atau

diduga penduduk kawin hanya sah menurut agama atau adat sehingga mereka tidak tercatat dalam database kependudukan.

#### **D. Kelahiran (Fertilitas)**

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Fertilitas itu sendiri merupakan kemampuan memproduksi yang sebenarnya dari penduduk (*actual reproduction performance*). Atau jumlah kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang atau sekelompok perempuan. Kelahiran yang dimaksud disini hanya mencakup kelahiran hidup, jadi bayi yang dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup meskipun hanya sebentar dan terlepas dari lamanya bayi itu dikandung.

Fertilitas sebagai istilah demografi diartikan sebagai hasil reproduksi yang nyata dari seseorang wanita atau sekelompok wanita. Dengan kata lain fertilitas ini menyangkut banyaknya bayi yang lahir hidup. Fekunditas, sebaliknya, merupakan potensi fisik untuk melahirkan anak. Jadi merupakan lawan arti kata sterilitas. Natalitas mempunyai arti sama dengan fertilitas hanya berbeda ruang lingkupnya. Fertilitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk sedangkan natalitas mencakup peranan kelahiran pada perubahan penduduk dan reproduksi manusia.

Istilah fertilitas juga sering disebut dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang wanita dengan adanya tanda-tanda kehidupan, seperti bernapas, berteriak, bergerak, jantung berdenyut dan lain sebagainya. Sedangkan paritas merupakan jumlah anak yang telah dipunyai oleh wanita. Apabila waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan, maka disebut dengan lahir mati (*Still Birth*) yang di dalam demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran.

Informasi kelahiran ini bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

## 1. Angka Kelahiran Kasar (*Crude Birth Rate*)

Angka Kelahiran Kasar menunjukkan jumlah kelahiran hidup pada banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran mortalitas yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar. Angka kelahiran kasar (CBR) Kabupaten Rembang adalah 12,93 yang bermakna dari 1.000 penduduk pada tahun pertengahan terjadi 12 kelahiran hidup. Angka kelahiran kasar paling tinggi adalah Sarang yaitu 14,57. Hal ini berarti pada tahun 2022 di Kecamatan Sarang setiap 1.000 penduduk pertengahan tahun tahun terjadi 14 kelahiran hidup dilihat dari tabel 3.11.

**Tabel 3.10**  
**Angka Kelahiran Kasar**

No	Kecamatan		Jumlah Kelahiran Hidup	Jumlah Penduduk			Angka Kelahiran Kasar
	Kode	Nama		Periode Sebelum	Periode Sekarang	Pertengahan Periode	
1	33.17.01	SUMBER	455	36.988	37.367	37.120	12,26
2	33.17.02	BULU	346	28.146	28.401	28.182	12,28
3	33.17.03	GUNEM	244	24.448	24.553	24.451	9,98
4	33.17.04	SALE	441	38.798	39.053	38.810	11,36
5	33.17.05	SARANG	894	61.230	61.925	61.360	14,57
6	33.17.06	SEDAN	802	55.618	56.277	55.667	14,41
7	33.17.07	PAMOTAN	663	50.266	50.609	50.315	13,18
8	33.17.08	SULANG	456	39.332	39.608	39.324	11,60
9	33.17.09	KALIORI	546	42.848	43.264	42.956	12,71
10	33.17.10	REMBANG	1.177	91.618	92.066	91.555	12,86
11	33.17.11	PANCUR	409	31.093	31.396	31.083	13,16
12	33.17.12	KRAGAN	874	65.211	65.813	65.276	13,39
13	33.17.13	SLUKE	417	29.770	29.863	29.612	14,08
14	33.17.14	LASEM	640	51.111	51.509	51.255	12,49
Jumlah			8.364	646.477	651.704	646.966	12,93

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Tabel 3.11 menunjukkan angka kelahiran kasar di Kabupaten Rembang sebesar 12,93 yang artinya dari 1.000 penduduk di Kabupaten Rembang terdapat 12 kelahiran. Data penduduk

Kabupaten Rembang usia nol tahun (data kelahiran hidup) yang ada pada tahun 2022 ini diduga belum semua tercatat atau terlapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau diduga saat bayi lahir hidup lalu meninggal saat itu juga, tidak dicatatkan sebagai kelahiran hidup tetapi dicatatkan sebagai lahir mati.

## **2. Angka Kematian**

Kematian atau mortalitas merupakan salah satu komponen demografi selain fertilitas dan migrasi yang mempengaruhi jumlah struktur dan komposisi penduduk. Pengaruh kematian adalah mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah. Kematian dapat terjadi pada penduduk laki-laki, perempuan, usia bayi, usia anak, usia remaja, usia dewasa maupun usia tua. Besar kecilnya kematian menurut karakteristik tersebut berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan perubahan struktur umur dan jenis kelamin penduduk di suatu wilayah.

Kasus kematian dalam jumlah yang besar menjadi suatu masalah yang dapat berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, adat istiadat maupun kondisi kesehatan lingkungan. Peristiwa kematian terjadi secara mendadak karena kecelakaan maupun melalui serangkaian peristiwa kesakitan atau morbiditas. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah tidak hanya memengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

### **a. Jumlah Pencatatan Kematian**

Jumlah kematian menunjukkan kematian yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Informasi tentang jumlah kematian digunakan untuk memonitor kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan penduduk. Selain itu data tentang jumlah kematian merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kematian/mortalitas lainnya. Data mengenai jumlah penduduk yang meninggal di Kabupaten Rembang belum sepenuhnya tercatat dalam *database* SIAK. Masih kurangnya kesadaran penduduk untuk segera melaporkan adanya peristiwa

kematian di lingkungan keluarganya menjadi salah satu penyebab pelaporan kematian ini tidak lengkap dan terbaru (*up to date*).

**Tabel 3.11**  
**Jumlah Pencatatan Kematian Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Desember Tahun 2022**

No	Kecamatan	Pria		Wanita		Jumlah	
		N	%	N	%	N	%
1	SUMBER	100	8.64%	82	9.00%	182	8.80%
2	BULU	53	4.58%	36	3.95%	89	4.30%
3	GUNEM	24	2.07%	28	3.07%	52	2.51%
4	SALE	66	5.70%	40	4.39%	106	5.13%
5	SARANG	89	7.69%	73	8.01%	162	7.83%
6	SEDAN	69	5.96%	46	5.05%	115	5.56%
7	PAMOTAN	98	8.47%	72	7.90%	170	8.22%
8	SULANG	78	6.74%	61	6.70%	139	6.72%
9	KALIORI	61	5.27%	65	7.14%	126	6.09%
10	REMBANG	187	16.16%	188	20.64%	375	18.13%
11	PANCUR	39	3.37%	23	2.52%	62	3.00%
12	KRAGAN	114	9.85%	68	7.46%	182	8.80%
13	SLUKE	67	5.79%	38	4.17%	105	5.08%
14	LASEM	112	9.68%	91	9.99%	203	9.82%
TOTAL		1,157	100.00%	911	100.00%	2,068	100.00%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Jumlah kematian pada tahun 2022 di Kabupaten Rembang adalah 2.068 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah pencatatan kematian paling banyak di Kabupaten Rembang adalah pencatatan kematian laki-laki sebesar 1.157 jiwa. sementara itu jumlah pencatatan kematian perempuan tercatat 911 jiwa dari jumlah kematian total penduduk di Rembang. Apabila melihat cakupan wilayahnya, jumlah pencatatan kematian paling tinggi terdapat di kecamatan rembang yaitu 375 jiwa atau sekitar 18,13 persen dari jumlah total pencatatan kematian yang terjadi di Kabupaten Rembang. Sementara itu kecamatan gunem dengan jumlah pencatatan kematian paling rendah tahun 2022 adalah sebesar 52 jiwa atau 2,51 persen. Tinggi rendahnya jumlah pencatatan kematian ini belum bisa menjadi parameter yang menunjukkan baik buruknya derajat kesehatan di

Kabupaten Rembang karena penyebab kematian tidak teridentifikasi dengan jelas akibat ketiadaan data yang akurat.

**b. Angka Kematian Kasar (*Crude Death Rate/CDR*)**

Angka Kematian Kasar (CDR) merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian selama 1 tahun untuk setiap 1.000 penduduk. Parameter ini dikatakan kasar karena jumlah pembaginya adalah total penduduk seluruhnya pada pertengahan tahun. Pada kenyataannya mortalitas berbeda-beda menurut umur dan jenis kelamin. Angka kematian kasar Kabupaten Rembang pada tahun 2022 adalah 3,20 Hal ini bermakna bahwa pada tahun 2022 di Kabupaten Rembang terdapat 3-4 orang yang meninggal dari setiap 1.000 penduduk. Pada tahun 2022 jumlah kematian tertinggi terjadi di kecamatan sumber dengan angka kematian kasar 4,92 atau 4-5 kematian setiap 1.000 penduduk. Selanjutnya kecamatan rembang Angka kematian tertinggi berikutnya adalah atau terdapat 4,09 hingga 4-5 kematian per 1.000 penduduk. Angka kematian atau jumlah kematian yang tinggi bila tidak dikarenakan jumlah penduduk yang memang tinggi mengindikasikan terdapat masalah yang memicu timbulnya penyebab-penyebab kematian. Oleh sebab itu, temuan ini menjadi pekerjaan rumah untuk menelusuri penyebab kematian di masing-masing wilayah.

**Tabel 3.12**  
**Angka Pencatatan Kematian Kasar Berdasarkan Jenis Kelamin**  
**Desember Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah Pencatatan Kematian	Angka Kematian Kasar
		Awal Tahun	Akhir Tahun	Tengah Tahun		
1	SUMBER	37.120	37.367	36.988	182	4,92
2	BULU	28.182	28.401	28.146	89	3,16
3	GUNEM	24.451	24.553	24.448	52	2,13
4	SALE	38.810	39.053	38.798	106	2,73
5	SARANG	61.360	61.925	61.230	162	2,65
6	SEDAN	55.667	56.277	55.618	115	2,07
7	PAMOTAN	50.315	50.609	50.266	170	3,38
8	SULANG	39.324	39.608	39.332	139	3,53
9	KALIORI	42.956	43.264	42.848	126	2,94
10	REMBANG	91.555	92.066	91.618	375	4,09
11	PANCUR	31.083	31.396	31.093	62	1,99
12	KRAGAN	65.276	65.813	65.211	182	2,79
13	SLUKE	29.612	29.863	29.770	105	3,53
14	LASEM	51.255	51.509	51.111	203	3,97
TOTAL		646.966	651.704	646.477	2.068	3,20

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

## **BAB IV**

### **KUALITAS PENDUDUK**

Kualitas Penduduk adalah mutu kondisi penduduk dalam aspek fisik maupun non fisik yang dibarengi dengan tingkat ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan modal dasar dalam mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya dan berkepribadian. Kualitas penduduk juga dapat dimaknai dengan taraf kehidupan penduduk yang berkaitan dengan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Masalah kependudukan dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan berkaitan dengan mutu kehidupan dan kemampuan sumber daya manusia. Masalah kualitas penduduk dipengaruhi oleh pendidikan, sumber daya manusia, kesehatan, ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya. Secara internasional kualitas pembangunan manusia diukur dengan indikator pembangunan manusia yang terdiri dari tingkat pendidikan melek huruf dan rata-rata lama sekolah, kesehatan (angka kematian bayi dan angka harapan hidup waktu lahir) serta kesejahteraan yang diukur dengan penghasilan perkapita.

#### **A. Kesehatan**

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Kondisi umum kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Sementara itu pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain ketersediaan dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, tenaga kesehatan, pembiayaan dan manajemen kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan dasar, yaitu Puskesmas yang diperkuat dengan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling, telah didirikan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meskipun fasilitas pelayanan kesehatan dasar tersebut terdapat di semua kecamatan, namun pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan masih menjadi kendala. Fasilitas ini belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat, terutama terkait dengan biaya dan jarak transportasi. Fasilitas pelayanan kesehatan lainnya adalah Rumah Sakit yang terdapat di hampir semua kabupaten/kota, namun sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan belum dapat berjalan dengan optimal.

Ketersediaan mutu, keamanan obat, dan perbekalan kesehatan masih belum optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Dalam hal tenaga kesehatan, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Permasalahan besar tentang SDM adalah inefisiensi dan inefektivitas SDM dalam menanggulangi masalah kesehatan. Walaupun rasio SDM kesehatan telah meningkat, tetapi masih jauh dari target Indonesia Sehat 2010 dan variasinya antar daerah masih tajam. Dengan produksi SDM kesehatan dari institusi pendidikan saat ini, target tersebut sulit untuk dicapai.

## **B. Pendidikan**

Pendidikan merupakan aspek penting dalam menentukan kemajuan suatu bangsa. Melalui pendidikan, proses pendewasaan dan pengembangan potensi penduduk dapat dikembangkan. Penduduk dengan tingkat pendidikan relatif lebih tinggi memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi jika dibandingkan dengan penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, sangatlah tepat jika pemerintah

Indonesia menempatkan kualitas penduduk sebagai salah satu modal dasar pembangunan nasional.

Komposisi penduduk berdasarkan kualitas pendidikan umumnya diukur dengan persentase jumlah penduduk yang berhasil menempuh setiap jenjang pendidikan sekolah, mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Semakin banyak proporsi jumlah penduduk yang berhasil menyelesaikan studi sampai ke jenjang SMA dan perguruan tinggi, menjadi indikasi semakin baik kualitas penduduk.

Data pendidikan yang ada pada database SIAK adalah data penduduk yang telah tamat sekolah dan didefinisikan sebagai jenjang pendidikan yang telah berhasil diselesaikan oleh seseorang dengan dibuktikan adanya ijazah atau surat tanda tamat belajar. Tetapi jika menggunakan ukuran menurut jenjang tertinggi, maka merupakan jenjang atau kelas tertinggi yang pernah ditempuh oleh seseorang misalnya penduduk hanya sekolah sampai kelas 2 SLTP atau kelas 3 SLTP tapi tidak memperoleh ijazah.

### **1. Angka Melek Huruf**

Angka Melek Huruf merupakan alat ukur untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf. Dengan demikian, dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan ketrampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik sehingga penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan; - Dapat digunakan sebagai tolok ukur target perencanaan dan evaluasi program pemberantasan buta huruf:

- Dapat digunakan untuk mengevaluasi program pemberantasan buta huruf;
- Dapat digunakan untuk mengevaluasi program pemberantasan kemiskinan, program pembangunan di bidang kesehatan dan program pembangunan manusia lainnya;

- Dapat digunakan untuk mengidentifikasi jenis media informasi dan komunikasi yang dapat diakses masyarakat.

**Tabel 4.1**  
**Angka Melek Huruf Tahun 2022**

<b>Karakteristik</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Huruf Lainnya</b>
(1)	(2)	(3)
<b>Jenis Kelamin</b>		
Laki-Laki	95,15	84,71
Perempuan	91,63	81,35
<b>Kelompok Pengeluaran</b>		
40 Persen Terbawah	91,43	81,74
40 Persen Tengah	94,42	85,25
20 Persen Teratas	95,00	81,18
<b>Kab. Rembang</b>	<b>93,39</b>	<b>83,03</b>

Sumber : BPS, Tahun 2022, diolah

Dari tabel 4.1 artinya pada tahun 2022 penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Rembang yang mampu membaca huruf latin sebesar 93,39 persen, sedangkan untuk kemampuan membaca dan menulis huruf lainnya sebesar 83,03 persen.

## **2. Angka Putus Sekolah**

Yang dimaksud dengan Angka Putus Sekolah adalah Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

**Tabel 4.2**  
**Angka Putus Sekolah Tahun 2022**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Putus Sekolah			Jumlah Pelajar			Angka Putus Sekolah
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
1	TK	-	-	0	7.945	7.463	15.408	0
2	SD	308	308	616	24.905	22.886	47.791	1.29%
3	SMP	122	78	200	9.946	8.320	18.266	1.09%
4	SMA	64	18	82	11.467	9.114	20.581	0.40%
5	Perguruan Tinggi	-	-	0	0	-	0	0.00%
JUMLAH		494	404	898	54.263	47.783	102.046	0.88%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Angka Putus Sekolah digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur (7-12, 13-15 dan 16-18 tahun) Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik

### C. Ekonomi

Dari sisi ekonomi, ketenagakerjaan merupakan salah satu isu penting di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan yakni isu pengangguran. Karena permasalahan pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seiring dengan penyerapan tenaga kerja atau dengan kata lain, jika pertumbuhan ekonomi ada otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Target Nasional Tahun 2022 setiap pertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap mencapai 500 ribu orang. Dalam ilmu ekonomi, salah satu faktor produksi yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja.

Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas, tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap

tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Akibat tidak sebandingnya ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah angkatan kerja atau ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia berdampak banyaknya angkatan kerja yang tidak dapat masuk ke pasar kerja (pengangguran).

Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah-masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. Data tentang situasi ketenagakerjaan merupakan salah satu data pokok yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian, sosial, bahkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah dan dalam suatu/kurun waktu tertentu.

### **1. Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja**

Tenaga kerja (*Manpower*) merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU nomor 13 Tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja batas usia kerja penduduk yang diberlakukan pada Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang ini adalah penduduk berusia 15-64 tahun karena dianggap mempunyai potensi untuk bekerja secara produktif dan merupakan modal bagi Bergeraknya roda pembangunan.

Tenaga Kerja terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Dengan demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja.

**Tabel 4.3**  
**Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Tenaga Kerja (Penduduk 15 - 64 Tahun)		Jumlah Penduduk		Persentase Tenaga Kerja
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	26519	5.74%	37367	5,73%	70.97%
2	33.17.02	BULU	20386	4.41%	28401	4,36%	71.78%
3	33.17.03	GUNEM	17642	3.82%	24553	3,77%	71.85%
4	33.17.04	SALE	28004	6.06%	39053	5,99%	71.71%
5	33.17.05	SARANG	43939	9.51%	61925	9,50%	70.96%
6	33.17.06	SEDAN	39817	8.62%	56277	8,64%	70.75%
7	33.17.07	PAMOTAN	35547	7.70%	50609	7,77%	70.24%
8	33.17.08	SULANG	28125	6.09%	39608	6,08%	71.01%
9	33.17.09	KALIORI	30674	6.64%	43264	6,64%	70.90%
10	33.17.10	REMBANG	65185	14.11%	92066	14,13%	70.80%
11	33.17.11	PANCUR	22008	4.76%	31396	4,82%	70.10%
12	33.17.12	KRAGAN	47089	10.19%	65813	10,10%	71.55%
13	33.17.13	SLUKE	21087	4.56%	29863	4,58%	70.61%
14	33.17.14	LASEM	35924	7.78%	51509	7,90%	69.74%
Jumlah			461946	100.00%	651704	100.00%	70.88%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Dari 651.704 jiwa penduduk Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022, 461.946 orang (70,88% dari total penduduk) merupakan penduduk usia kerja (15-64 tahun) seperti terlihat pada tabel 4.3. Jumlah penduduk usia kerja ini cukup besar dan sesuai dengan hukum ekonomi bahwa semakin besar jumlah tenaga kerja di suatu daerah, maka penawaran tenaga kerja (*supply of labor*) juga semakin tinggi. Namun apabila tidak diikuti dengan permintaan akan tenaga kerja (*demand of labor*), maka akan terjadi pengangguran yang cukup tinggi.

Jika diperhatikan menurut kecamatan dari tabel 4.3 terlihat bahwa Kecamatan Rembang yakni sebesar 65.185 orang (14,11%) merupakan kecamatan dengan jumlah tenaga kerja terbesar sedangkan Kecamatan Gunem merupakan kecamatan dengan jumlah tenaga kerja terkecil yakni 17.536 orang (3,86%).

Besarnya jumlah tenaga kerja yang ada di Kabupaten Rembang akan semakin besar pula kebutuhan lowongan pekerjaan (kesempatan

kerja). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten perlu mencari jalan keluar agar tenaga kerja ini dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang.

## **D. Sosial**

### **1. Jumlah Penduduk Penyandang Disabilitas**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/keterpencilan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut perlu dibina melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sesuai dengan pasal 6 UU NO. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Salah satu jenis PMKS yang dapat disajikan dari database kependudukan adalah penyandang disabilitas (penyandang cacat). Data dan informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam rangka memberikan program pelayanan publik, dasar perencanaan pembangunan berbagai fasilitas umum yang ramah penyandang cacat, pelayanan fasilitas pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja dan lain sebagainya. Selama ini perhatian pemerintah dianggap masih kurang dan masih banyak perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik kepada kelompok ini dan kebijakan pemerintah terhadap penyandang disabilitas (penyandang cacat) masih bersifat *charity* (belas kasihan).

Kurangnya sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas ini menyebabkan perlakuan yang kurang peduli, seperti berbagai kantor pelayanan publik belum ramah

terhadap penyandang cacat terutama cacat fisik, bahkan untuk pelayanan administrasi kependudukan.

Untuk itu, informasi tentang banyaknya penduduk penyandang cacat dan jenis kecacatannya sangat diperlukan dalam menyusun program pelayanan publik yang ramah penyandang cacat. Oleh sebab itu, informasi ini dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pengembangan pelayanan bagi penduduk dengan kategori khusus (penyandang cacat). Sumber data yang diolah adalah hasil registrasi penduduk melalui SIAK.

**Tabel 4.4**  
**Angka Penyandang Cacat Tahun 2022**

No	Kecamatan		Angka Penyandang Cacat		Jumlah Penduduk		Persentase
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	152	6.27%	37.367	5,73%	0.41%
2	33.17.02	BULU	130	5.36%	28.401	4,36%	0.46%
3	33.17.03	GUNEM	114	4.70%	24.553	3,77%	0.46%
4	33.17.04	SALE	128	5.28%	39.053	5,99%	0.33%
5	33.17.05	SARANG	102	4.20%	61.925	9,50%	0.16%
6	33.17.06	SEDAN	106	4.37%	56.277	8,64%	0.19%
7	33.17.07	PAMOTAN	180	7.42%	50.609	7,77%	0.36%
8	33.17.08	SULANG	242	9.98%	39.608	6,08%	0.61%
9	33.17.09	KALIORI	138	5.69%	43.264	6,64%	0.32%
10	33.17.10	REMBANG	466	19.21%	92.066	14,13%	0.51%
11	33.17.11	PANCUR	140	5.77%	31.396	4,82%	0.45%
12	33.17.12	KRAGAN	144	5.94%	65.813	10,10%	0.22%
13	33.17.13	SLUKE	76	3.13%	29.863	4,58%	0.25%
14	33.17.14	LASEM	308	12.70%	51.509	7,90%	0.60%
Jumlah			2.426	100.00%	651.704	100.00%	0.37%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa jumlah penduduk penyandang disabilitas yang tercatat dalam database kependudukan di Kabupaten Rembang adalah sebanyak 2.426 jiwa (0,37%), jumlah ini tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk Kabupaten Rembang yaitu 651.704 jiwa. Pelayanan adminduk adalah pelayanan inklusif mencakup pelayanan terhadap semua penduduk penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Rembang.

## BAB V

### MOBILITAS PENDUDUK

Pertumbuhan penduduk di suatu negara dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu, mortalitas dan mobilitas penduduk. Istilah mobilitas penduduk diartikan menjadi gerak penduduk seperti yang dinyatakan oleh Mantra (1985:15) "Mobilitas penduduk yaitu semua gerak penduduk dalam (waktu tertentu dan batas (wilayah administrasi tertentu seperti batas propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya". Peranan mobilitas penduduk terhadap laju pertumbuhan penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainnya berbeda-beda.

Mobilitas penduduk memiliki kaitan erat dengan pembangunan sebab mobilitas penduduk merupakan bagian integral dari proses pembangunan secara keseluruhan. Artinya tidak ada pembangunan tanpa mobilitas penduduk dan begitu pula sebaliknya. Tinggi rendahnya mobilitas penduduk di suatu daerah akan berpengaruh terhadap strategi pembangunan yang dipilih, sehingga pembangunan akan betul-betul meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk atau masyarakat yang mendukung pembangunan tersebut. Pada pihak lain intensitas dari pembangunan di suatu daerah juga berpengaruh terhadap mobilitas penduduk, arus mobilitas penduduk ke daerah tersebut akan besar apabila intensitas pembangunannya tinggi, dan begitu juga sebaliknya. Mobilitas dilakukan untuk mempertahankan hidup dan disebabkan karena adanya kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial suatu daerah. Tidak akan terjadi proses pembangunan tanpa adanya mobilitas penduduk. Tetapi juga tidak akan terjadi pengarahannya penyebaran penduduk yang berarti tanpa adanya kegiatan pembangunan itu sendiri.

Mobilitas penduduk ada yang bersifat permanen (migrasi) dan ada yang bersifat non permanen. Pada dasarnya penduduk yang melakukan mobilitas dari wilayah satu ke wilayah lainnya bertujuan untuk menetap di wilayah yang dikunjunginya. Namun adakalanya

mereka berpindah untuk sementara waktu baik dalam waktu harian, mingguan, bulanan, atau mungkin lebih lama lagi. Mobilitas penduduk semacam ini disebut mobilitas penduduk non permanen. Berdasarkan lamanya waktu di tempat tujuan mobilitas penduduk non permanen dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi.

Mobilitas permanen atau migrasi itu terbagi menjadi 2 (dua) yakni migrasi internasional dan migrasi nasional (dalam negeri). Adapun yang akan dibahas dalam bab ini adalah migrasi nasional baik migrasi masuk maupun keluar.

**Tabel 5.1**  
**Angka Migrasi Masuk per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Migrasi Masuk				Jumlah Penduduk Pertengahan Periode	Angka Migrasi Masuk
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah			
					N	%		
1	33.17.01	SUMBER	63	214	277	4.06%	37120	7.46
2	33.17.02	BULU	43	162	205	3.01%	28182	7.27
3	33.17.03	GUNEM	122	442	564	8.27%	24451	23.07
4	33.17.04	SALE	86	250	336	4.93%	38810	8.66
5	33.17.05	SARANG	91	321	412	6.04%	61360	6.71
6	33.17.06	SEDAN	82	291	373	5.47%	55667	6.70
7	33.17.07	PAMOTAN	101	375	476	6.98%	50315	9.46
8	33.17.08	SULANG	261	980	1241	18.20%	39324	31.56
9	33.17.09	KALIORI	54	220	274	4.02%	42956	6.38
10	33.17.10	REMBANG	50	204	254	3.73%	91555	2.77
11	33.17.11	PANCUR	174	572	746	10.94%	31083	24.00
12	33.17.12	KRAGAN	110	457	567	8.32%	65276	8.69
13	33.17.13	SLUKE	89	301	390	5.72%	29612	13.17
14	33.17.14	LASEM	146	557	703	10.31%	51255	13.72
Jumlah			1472	5346	6818	100.00%	646,966	10.54

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Tabel 5.1 menunjukkan jumlah migrasi masuk (penduduk yang datang) ke Kabupaten Rembang pada tahun 2022 jumlahnya mencapai 6.818 jiwa dengan komposisi laki-laki sebesar 1.472 jiwa dan perempuan 5.346 jiwa. Dari tabel 5.1 juga terlihat bahwa angka migrasi masuk Kabupaten Rembang tahun 2022 sebesar 10.54 jiwa yang

berarti bahwa dari 1.000 penduduk Kabupaten Rembang terdapat 10 penduduk masuk ke Kabupaten Rembang.

**Tabel 5.2**  
**Angka Migrasi Keluar per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Migrasi Keluar				Jumlah Penduduk Pertengahan Periode	Angka Migrasi Keluar
	Kode	Nama	Pria	Wanita	Jumlah			
					N	%		
1	33.17.01	SUMBER	165	124	289	4.02%	37120	7.79
2	33.17.02	BULU	119	106	225	3.13%	28182	7.98
3	33.17.03	GUNEM	302	298	600	8.36%	24451	24.54
4	33.17.04	SALE	196	162	358	4.99%	38810	9.22
5	33.17.05	SARANG	184	177	361	5.03%	61360	5.88
6	33.17.06	SEDAN	181	174	355	4.94%	55667	6.38
7	33.17.07	PAMOTAN	243	257	500	6.96%	50315	9.94
8	33.17.08	SULANG	641	630	1271	17.70%	39324	32.32
9	33.17.09	KALIORI	148	121	269	3.75%	42956	6.26
10	33.17.10	REMBANG	170	160	330	4.60%	91555	3.60
11	33.17.11	PANCUR	454	375	829	11.54%	31083	26.67
12	33.17.12	KRAGAN	305	309	614	8.55%	65276	9.41
13	33.17.13	SLUKE	184	155	339	4.72%	29612	11.45
14	33.17.14	LASEM	457	384	841	11.71%	51255	16.41
Jumlah			3749	3432	7181	100.00%	646,966	11.10

*Sumber* : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Dari tabel 5.2 juga nampak bahwa migrasi penduduk yang keluar Kabupaten Rembang (penduduk yang keluar/pindah) sesuai hasil pendaftaran penduduk pindah dan datang tahun 2022 adalah 7.181 jiwa yang terdiri dari 3.749 orang laki-laki dan 3.432 orang perempuan.

Tabel 5.2 juga menunjukkan angka migrasi keluar penduduk Kabupaten Rembang tahun 2022, angka migrasi keluar dari Kabupaten Rembang tahun 2022 sebesar 11,10 yang berarti bahwa dari 1.000 penduduk Kabupaten Rembang terdapat 11 penduduk keluar dari Kabupaten Rembang.

**Tabel 5.3**  
**Angka Migrasi Neto per Kecamatan**

No	Kecamatan		Jumlah Migrasi			Jumlah Penduduk Pertengahan Periode	Angka Migrasi Neto
	Kode	Nama	Masuk	Keluar	Selisih		
1	33.17.01	SUMBER	277	289	-12	37.120	-0.32
2	33.17.02	BULU	205	225	-20	28.182	-0.71
3	33.17.03	GUNEM	564	600	-36	24.451	-1.47
4	33.17.04	SALE	336	358	-22	38.810	-0.57
5	33.17.05	SARANG	412	361	51	61.360	0.83
6	33.17.06	SEDAN	373	355	18	55.667	0.32
7	33.17.07	PAMOTAN	476	500	-24	50.315	-0.48
8	33.17.08	SULANG	1.241	1.271	-30	39.324	-0.76
9	33.17.09	KALIORI	274	269	5	42.956	0.12
10	33.17.10	REMBANG	254	330	-76	91.555	-0.83
11	33.17.11	PANCUR	746	829	-83	31.083	-2.67
12	33.17.12	KRAGAN	567	614	-47	65.276	-0.72
13	33.17.13	SLUKE	390	339	51	29.612	1.72
14	33.17.14	LASEM	703	841	-138	51.255	-2.69
Jumlah			6.818	7.181	-363	64.6966	-0.56

*Sumber* : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Perbandingan antara penduduk yang masuk (datang) dan keluar (pindah) adalah 1:11 artinya bahwa dari 1 penduduk yang masuk ke Kabupaten Rembang terdapat 11 penduduk yang keluar.

Dari tabel 5.3 di atas juga terlihat bahwa migrasi yang terjadi di Kabupaten Rembang adalah migrasi negatif, dimana migrasi masuk lebih sedikit daripada migrasi keluar.

Pada hakikatnya migrasi penduduk merupakan cermin dari perbedaan pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan fasilitas pembangunan antara satu daerah dengan daerah lain. Penduduk yang berada di daerah yang pertumbuhannya ekonominya rendah cenderung akan berpindah menuju daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Model todaro secara sekilas nampak kurang memperhatikan arti penting migrasi desa-kota (karena model ini berpendapat bahwa migrasi tersebut pada dasarnya merupakan suatu mekanisme

penyesuaian alokasi tenaga kerja di desa dan di kota), namun model tersebut mengandung sejumlah implikasi kebijakan yang sangat penting bagi Dunia ketiga.

Berikut ini adalah lima implikasi kebijakan yang paling penting.

1. Ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa harus dikurangi.
2. Pemecahan masalah pengangguran tidak cukup hanya dengan penciptaan lapangan kerja di kota dan kesempatan kerja di pedesaan dalam waktu bersamaan.
3. Pengembangan pendidikan yang berlebihan mengakibatkan migrasi dan pengangguran
4. Pemberian subsidi upah dan penentuan harga faktor produksi tradisional (tenaga kerja) justru menurunkan produktivitas. Salah satu resep kebijakan ekonomi yang baku untuk menciptakan kesempatan kerja di perkotaan adalah dengan menghilangkan distorsi harga faktor produksi dan menggunakan harga yang “sebenarnya” (dibentuk oleh mekanisme pasar).
5. Program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu.

## **BAB VI**

### **KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN**

Setiap penduduk Indonesia wajib memiliki dokumen Kependudukan sebagai bukti keberadaan dan identitas penduduk yang bersangkutan yang diakui secara legal oleh negara. Dokumen Kependudukan itu sendiri adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen kependudukan yang dimaksud antara lain KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain sebagainya. Adapun penerbitan dokumen kependudukan di Indonesia menjadi kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang dibantu oleh Kecamatan dan Kelurahan. Dokumen kependudukan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemilikinya. Misalnya akta kelahiran, menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen kependudukan yang lain. Kepemilikan dokumen ini sangat diperlukan untuk memperoleh berbagai pelayanan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Sementara bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan bermanfaat dalam melakukan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Semula pelaporan dan pengurusan dokumen kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk diwajibkan untuk mengurus sendiri dokumen kependudukannya, namun berdasarkan Undang-undang no. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan aturan tersebut diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada Pemerintah melalui Petugas, baik petugas dari pemerintah daerah maupun RT dan RW.

Manfaat dokumen kependudukan antara lain :

1. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk (individual & kelompok).
2. Memberikan kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya.
4. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi & pelayanan publik lainnya.

#### **A. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTPel)**

Kartu Tanda penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang di bawah 17 tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya.

Tahun 2011 mulai diterapkan program KTP elektronik, adapun program e-KTP dilatarbelakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Belum adanya basis data terpadu tingkat nasional memungkinkan seseorang memiliki lebih dari satu KTP. Hal tersebut memberikan peluang kepada oknum2 untuk berbuat curang antara lain untuk:

1. Menghindari pajak
2. Memudahkan pembuatan paspor yang tidak dapat dibuat di seluruh kota
3. Mengamankan korupsi atau kejahatan/kriminalitas lainnya
4. Menyembunyikan identitas (seperti teroris)
5. Memalsukan dan menggandakan ktp

Dalam rangka pelaksanaan *e-Government* serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menerapkan suatu sistem informasi kependudukan yang berbasis teknologi yaitu Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP/KTP-el.

Terkait KTP-el berlaku seumur hidup pada 29 Januari 2016. Menteri Dalam Negeri membuat Surat Edaran yang isinya menyatakan *semua e-KTP berlaku seumur hidup, walaupun ada yang tertulis masa berlaku seperti 2016, dan 2017 tetapi berlakunya sama seumur hidup*. Sesuai Undang-undang nomor 24 tahun 2013 pasal 64 ayat (7) huruf a mengamanatkan KTP elektronik warga negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup. Selanjutnya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sebelum UU tersebut ditetapkan berlaku seumur hidup.

"Artinya KTP elektronik yang sudah diterbitkan sejak 2011 berlaku seumur hidup, tak perlu diperpanjang walaupun telah habis masa berlakunya, kecuali ada perubahan elemennya.

Adapun fungsi KTP-el : Sebagai identitas jati diri; Berlaku nasional, sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening Bank, dan sebagainya; Mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP; Terciptanya keakuratan data penduduk untuk mendukung program pembangunan.

**Tabel 6.1**  
**Persentase Kepemilikan KTP**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Memiliki KTP		Jumlah Penduduk Wajib KTP		Persentase Kepemilikan KTP
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	29.179	5,87%	29.349	5,87%	99,42%
2	33.17.02	BULU	22.227	4,47%	22.310	4,46%	99,63%
3	33.17.03	GUNEM	19.499	3,92%	19.583	3,92%	99,57%
4	33.17.04	SALE	30.531	6,14%	30.682	6,14%	99,51%
5	33.17.05	SARANG	46.485	9,35%	46.653	9,34%	99,64%
6	33.17.06	SEDAN	42.544	8,55%	42.661	8,54%	99,73%
7	33.17.07	PAMOTAN	38.261	7,69%	38.446	7,69%	99,52%
8	33.17.08	SULANG	30.877	6,21%	30.985	6,20%	99,65%
9	33.17.09	KALIORI	33.392	6,71%	33.601	6,72%	99,38%

10	33.17.10	REMBANG	69.361	13,94%	69.768	13,96%	99,42%
11	33.17.11	PANCUR	23.792	4,78%	23.898	4,78%	99,56%
12	33.17.12	KRAGAN	49.889	10,03%	50.132	10,03%	99,52%
13	33.17.13	SLUKE	22.814	4,59%	22.909	4,58%	99,59%
14	33.17.14	LASEM	38.575	7,75%	38.702	7,75%	99,67%
Jumlah			497.426	100.00%	499.679	100.00%	99,55%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa dari 499.679 jiwa wajib KTP 497.426 jiwa atau 99,55 persen sudah memiliki KTP-el.

## B. Kepemilikan Akta

Akta merupakan dokumen kependudukan yang sangat penting dan wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia. Akta merupakan pengakuan Negara atas status keperdataan seseorang baik dalam hubungan kekeluargaan maupun dalam hubungannya dengan pelayanan legal lainnya. Akta-akta yang dimaksud meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian. Data mengenai akta kematian belum dapat diperoleh sehingga belum disajikan dalam profil ini.

### 1. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya. Jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya dicantumkan nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran penting untuk dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti paspor.

**Tabel 6.2**  
**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran		Jumlah Penduduk		Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	17.600	5.19%	37.367	5.73%	47.10%
2	33.17.02	BULU	13.727	4.05%	28.401	4.36%	48.33%
3	33.17.03	GUNEM	10.887	3.21%	24.553	3.77%	44.34%
4	33.17.04	SALE	17.393	5.13%	39.053	5.99%	44.54%
5	33.17.05	SARANG	31.877	9.40%	61.925	9.50%	51.48%
6	33.17.06	SEDAN	29.113	8.59%	56.277	8.64%	51.73%
7	33.17.07	PAMOTAN	30.188	8.91%	50.609	7.77%	59.65%
8	33.17.08	SULANG	19.806	5.84%	39.608	6.08%	50.01%
9	33.17.09	KALIORI	21.924	6.47%	43.264	6.64%	50.67%
10	33.17.10	REMBANG	53.576	15.81%	92.066	14.13%	58.19%
11	33.17.11	PANCUR	17.402	5.13%	31.396	4.82%	55.43%
12	33.17.12	KRAGAN	31.451	9.28%	65.813	10.10%	47.79%
13	33.17.13	SLUKE	15.291	4.51%	29.863	4.58%	51.20%
14	33.17.14	LASEM	28.727	8.47%	51.509	7.90%	55.77%
Jumlah			338.962	100.00%	651.704	100.00%	52.01%

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah*

Tabel. 6.2 menggambarkan kepemilikan akta kelahiran penduduk Kabupaten Rembang terhadap total penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan data yang terdapat dalam database SIAK Kabupaten Rembang, terlihat bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Rembang hanya 52,01% (338.962 jiwa) sedangkan 312.742 penduduk (47,99%) tidak mempunyai akta kelahiran. Jika dilihat menurut kecamatan, maka sebagian besar kecamatan persentase kepemilikan akta kelahiran diatas 50 persen.

Masih adanya sejumlah penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, diduga mereka tidak melaporkan atau mencatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga mereka tidak tercatat di database SIAK. Kabupaten Rembang dalam pembuatan akte kelahiran menggunakan SIAK baru pada tahun 2022. Untuk itu, Kabupaten Rembang terus menerus melakukan pemutakhiran data terkait dengan kepemilikan akta kelahiran dan akta perkawinan.

## 2. Akta Perkawinan

Akta kawin merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat didalamnya.

**Tabel 6.3**  
**Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perkawinan		Jumlah Penduduk Berstatus Kawin		Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	16952	6.65%	21604	6.19%	78.47%
2	33.17.02	BULU	10519	4.13%	15992	4.58%	65.78%
3	33.17.03	GUNEM	9376	3.68%	14600	4.18%	64.22%
4	33.17.04	SALE	13398	5.26%	21659	6.20%	61.86%
5	33.17.05	SARANG	22003	8.63%	33111	9.48%	66.45%
6	33.17.06	SEDAN	21816	8.56%	29814	8.54%	73.17%
7	33.17.07	PAMOTAN	23143	9.08%	26163	7.49%	88.46%
8	33.17.08	SULANG	16461	6.46%	22006	6.30%	74.80%
9	33.17.09	KALIORI	15993	6.28%	24001	6.87%	66.63%
10	33.17.10	REMBANG	35357	13.87%	45803	13.12%	77.19%
11	33.17.11	PANCUR	12000	4.71%	16861	4.83%	71.17%
12	33.17.12	KRAGAN	26762	10.50%	35948	10.29%	74.45%
13	33.17.13	SLUKE	11606	4.55%	16256	4.65%	71.40%
14	33.17.14	LASEM	19460	7.64%	25400	7.27%	76.61%
Jumlah			254846	100.00%	349.218	100.00%	72.98%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Tabel 6.3 menggambarkan persentase penduduk berstatus kawin terhadap kepemilikan akta perkawinan, terlihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rembang yang berstatus kawin sebanyak 349.218 orang dan yang tercatat memiliki akta kawin hanya 72,98 persen, sedangkan yang tidak memiliki akta kawin persentasenya 27,02 persen (94.372 orang), Hal ini biasa ditemukan diseluruh Indonesia, karena ada diantara penduduk terutama penduduk muslim yang melakukan perkawinan secara agama saja, sehingga perkawinan

ini tidak diakui secara hukum negara atau penduduk berstatus kawin yang tidak memiliki akta kawin ini diduga belum mencatatkan akta kawin (buku nikah) ke Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, karena perkawinan mereka dicatat oleh KUA setempat atau penduduk yang berstatus kawin dan tidak memiliki akta kawin ini diduga saat pengisian formulir biodata penduduk tidak lengkap.

## 2. Akta Perceraian

Akta perceraian merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh penduduk yang berstatus cerai hidup. Tabel. 6.4 menggambarkan jumlah dan persentase penduduk berstatus cerai hidup yang memiliki akta perceraian di Kabupaten Rembang.

Tabel 6.4 menggambarkan jumlah penduduk berstatus cerai hidup dan kepemilikan akta cerai hidup di Kabupaten Rembang. terlihat bahwa 11.798 orang yang cerai memiliki akta cerai 6.735 orang dan 5.063 orang tidak memiliki akta cerai. Besarnya penduduk cerai yang tidak memiliki akta perceraian diduga penduduk berstatus cerai hidup ini tidak mencatatkan perceraianya. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Rembang dalam merencanakan suatu program kegiatan seperti penyuluhan akan pentingnya akta perceraian. Kurang pemahannya penduduk terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan diduga karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

**Tabel 6.4**

### **Persentase Kepemilikan Akta Perceraian**

No	Kecamatan		Jumlah Penduduk Memiliki Akta Perceraian		Jumlah Penduduk Berstatus Cerai Hidup		Persentase Kepemilikan Akta Perceraian
	Kode	Nama	N	%	N	%	
1	33.17.01	SUMBER	386	5.73%	632	5.36%	61.08%
2	33.17.02	BULU	296	4.39%	630	5.34%	46.98%
3	33.17.03	GUNEM	367	5.45%	586	4.97%	62.63%
4	33.17.04	SALE	351	5.21%	769	6.52%	45.64%
5	33.17.05	SARANG	507	7.53%	1067	9.04%	47.52%
6	33.17.06	SEDAN	615	9.13%	731	6.20%	84.13%
7	33.17.07	PAMOTAN	678	10.07%	877	7.43%	77.31%
8	33.17.08	SULANG	392	5.82%	777	6.59%	50.45%
9	33.17.09	KALIORI	386	5.73%	761	6.45%	50.72%

10	33.17.10	REMBANG	985	14.63%	1853	15.71%	53.16%
11	33.17.11	PANCUR	166	2.46%	426	3.61%	38.97%
12	33.17.12	KRAGAN	676	10.04%	1076	9.12%	62.83%
13	33.17.13	SLUKE	344	5.11%	570	4.83%	60.35%
14	33.17.14	LASEM	586	8.70%	1043	8.84%	56.18%
Jumlah			6735	100.00%	11798	100.00%	57.09%

*Sumber* : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2022, diolah

Tabel 6.4 juga menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Rembang yang berstatus cerai hanya 57,09 persen yang memiliki akta cerai dan 42,91 persen tidak memiliki akta cerai. Tingginya persentase penduduk yang berstatus cerai yang tidak memiliki akta cerai diduga mereka tidak mencatatkan perceraian terutama penduduk muslim karena yang mengeluarkan surat cerai adalah pengadilan agama. Dengan kecilnya kepemilikan akta baik akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian, maka perlu adanya kebijakan yang berkaitan sosialisasi akan pentingnya mencatatkan peristiwa penting atau kepemilikan akta atau melakukan pemutakhiran data penduduk sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali, karena jika menunggu penduduk yang aktif datang tidak akan termutakhirkan.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Demikian Penyusunan Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang Tahun 2022 yang merupakan gambaran perkembangan kependudukan Kabupaten Rembang pada Tahun 2022. Dimana data yang digunakan dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini adalah data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tersimpan dalam database kependudukan SIAK Kabupaten Rembang bulan Desember Tahun 2022 yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan dari OPD-OPD terkait.

Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Rembang ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi para pengambil kebijakan dalam merencanakan pembangunan baik nasional maupun daerah dan juga bermanfaat bagi instansi dan berbagai pihak yang membutuhkannya.